PROBLEMATIKA UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017 TERHADAP HAK-HAK PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Muhamad Rafli, Pamungkas Satya Putra

Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

muhamadrafli0510032@gmail.com, pamungkas.satya.putra@gmail.com

Abstract

Indonesian migrant workers must be protected based on human rights and other rights that have been regulated in Law Number 18 of 2017 concerning the protection of Indonesian migrant work in order to avoid problems and cases such as violence, crime, human trafficking, arbitrariness, and others. This study aims to explore how far and deep the rights of legal certainty granted to Indonesian migrant workers abroad are, as well as whether the legal protection provided through legislation and what is happening in its implementation is appropriate. So that this paper can provide answers and also suggestions related to what should be done in order to fix the existing problems. The cases that occur to Indonesian migrant workers are due to the fact that the laws given to them have not been implemented, which causes Indonesian migrant workers abroad to be vulnerable to problems and the need for special and in-depth attention for the Indonesian government to guarantee the rights of Indonesian migrant workers and the certainty of legal protection for them. The conclusions of this study explain the problems between regulations and the fact that Indonesian migrant workers are vulnerable to problems, especially regarding not being respected or guaranteed their rights when working. The problem of cases of harassment, human trafficking, forced labor, and other things is still a problem that is often encountered until now, this indicates that the rights of migrant workers are still not fully protected by the laws that have been regulated, and there is disharmony between existing laws and the reality that causes the existing legal regulations are not maximally implemented.

Keywords: *Migrant workers, workers' rights, legal protection*

Abstrak

Pekerja migran Indonesia wajib dilindungi berdasarkan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut HAM) dan hak-hak lainnya yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerjaan migran Indonesia agar terhindar dari permasalahan dan kasus-kasus seperti kekerasan, kejahatan, perdagangan manusia, kesewenang-wenangan, dan lain-lain. Penelitian ini bertujuan untuk meniti seberapa jauh dan mendalam terkait hak-hak kepastian hukum yang diberikan kepada pekerja migran Indonesia di luar negeri, serta apakah sudah sesuai antara perlindungan hukum yang diberikan melalui peraturan perundang-undangan dengan yang terjadi pada penerapannya. Sehingga tulisan ini dapat memberi jawaban dan juga saran-saran terkait yang dengan apa yang seharusnya dilaksanakan guna memperbaiki permasalahan yang ada. Kasus-kasus yang terjadi kepada pekerja migran Indonesia disebabkan karena belum terlaksanannya hukum yang diberikan yang menyebabkan pekerja migran Indonesia diluar negeri menjadi rentan akan permasalahan dan perlunya perhatian khusus dan mendalam bagi pemerintah Indonesia akan terjaminnya hak-hak pekerja migran Indonesia serta kepastian perlindungan hukum kepada mereka. Simpulan dari penelitian ini menjelaskan problematika antara peraturan dengan kenyataannya menjadikan para pekerja migran Indonesia rentan akan permasalahan khususnya mengenai tidak di hargainya ataupun dijaminnya hak-hak mereka ketika bekerja. Permasalahan kasus pelecehan, perdagangan manusia, kerja paksa, serta hal lainnya masih menjadi persoalan yang sering ditemui sampai sekarang, ini menandakan hak-hak pekerja migran masih belum sepenuhnya terlindungi oleh Hukum yang sudah diatur, dan terjadi disharmonisasi antara hukum yang ada dengan kenyataannya yang menyebabkan tidak terlaksana secara maksimal peraturan hukum yang ada.

Kata kunci : *Pekerja Migran, Hak-Hak Pekerja, Perlindungan Hukum*

A. Pendahuluan

Setiap orang membutuhkan pekerjaan untuk keberlangsungan hidup mereka, sehingga pekerjaan memiliki arti yang bermakna kehidupan masyarakat, dengan dimaknai bagaikan sumber pendapatan guna mencukupi kebutuhan mereka secara pribadi maupun untuk keluarganya. Juga menjadikan hidup mereka mempunyai tujuan dan merasa berharga untuk keluarga, lingkungan maupun dirinya sendiri. Dengan demikian hak asasi atas pekerjaan pada diri seseorang harus dihormati dan dijunjung tinggi. Pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 27 ayat (2) mengatakan semua WNI mempunyai hak memperoleh kehidupan yang layak dan hak atas pekerjaan, ini mencerminkan makna serta arti pentingnya pekerjaan bagi setiap orang.

Keterbatasan lowongan pekerjaan bagi Tenaga Kerja Indonesia (selanjutnya disebut TKI) menyebabkan mereka mencari pekerjaan ke luar negara Indonesia, kemudian selalu meningkat dari tahun ke tahun yang bekerja di luar negeri. Terdapat sisi positif bagi tenaga kerja yang bekerja di luar negeri yakni sedikit menekan masalah pengangguran di Indonesia. Namun, ada juga sisi negatifnya yaitu resiko terjadinya permasalahan kasus hak-hak yang dilanggar kepada TKI. Resiko selama bekerja, setelah pulang dan keberangkatan bisa dialami oleh TKI.¹

Minat migrasi antar negara menandakan keterbatasan lapangan pekerjaan di Indonesia bagi sebagian orang, ini juga karena negara Indonesia berada dalam urutan negara dengan penduduk padat di dunia akibatnya minat bermigrasi bisa dibilang tinggi. Melintas atau bermigrasi nya tenaga kerja antar negara menjelaskan lapangan pekerjaan di Indonesia dirasa masih sangat kurang, karena Negara Indonesia juga memiliki tenaga kerja yang amat banyak. Mengadu nasib di luar negeri dikarenakan minimnya jumlah lapangan pekerjaan. Hal tersebut yang menjadi alasan

pekerja migran Indonesia (selanjutnya disebut PMI) atau biasa disebut TKI mencari dan bekerja keluar negeri.²

Awal mula sejarah migrasi TKI keluar terjadi sebelum kemerdekaan Indonesia. Dimulai ketika para buruh kontrak ditempatkan ke negara Amerika Serikat tepatnya di Suriname oleh pemerintah Hindia Belanda sejak tahun 1890. Kuli kontrak yang sejumlah besar berasal dari Batak, Madura, Jawa, serta Sunda dipekerjaka di pekerbunan Suriname. Demi bentuk terlaksananya politik menghapuskan budak yang bertujuan guna mengubah tanggungjawab para budak Afrika yang sudah diberi kebebasan dari tahun 1863 tanggal 1 Juli, sehingga budak-budak tersebut bebas memilih lapangan kerja yang mereka hendaki. Akibat letusan Gunung Merapi lalu padatnya masyarakat di Pulau Jawa serta tingkat perekonomian pribumi di Jawa sangat rendah menjadikan alasan pemerintah Belanda mengambil TKI asal Jawa.³

Bermigrasi dapat memberi manfaat positif agar pekerja migran beserta keluarganya hidup sejahtera, tetapi memiliki dampak negatif berupa keselamatan maupun keberlangsungan hidup keluarganya yang lumayan beresiko. Dari mulai korban tindak pidana perdagangan manusia, terjerat kasus narkoba, pelecehan seksual serta gaji tidak dibayar merupakan beberapa resiko bekerja di luar negeri.⁴

Semakin meningkatnya dan besarnya jumlah PMI yang berada diluar negeri, juga berdampak dengan semakin meningkatnya kasus-kasus terhadap PMI, kasus tersebut semakin berkembang dan beragama yang mengarah kepada perdagangan manusia yang bisa masuk kategori kejahatan kemanusiaan. Oleh karena itu agar resiko

¹ Pocut Eliza, Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum Mengenai Perlindungan Hak dan Keselamatan Pekerja Migran (Jakarta: Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum, 2016), 1-2.

² Eka Putri Yuliana, Skripsi: Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Terhadap Perlindungan Hak Pekerja Migran Indonesia studi di P4TKI Malang, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019), 2.

³ Thaus Sugihilmi Arya Putra, "Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri," Diakses pada 23 Oktober 2022, 14:16, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/15248/Perlindungan-Hukum-Pekerja-Migran-Indonesia-di-Luar-Negeri.html>

⁴ Eka Putri Yuliani, Op.cit., 3.

perlakuan terhadap PMI dapat dikurangi atau dapat dihindari perlu dilakukannya pengaturan khusus untuk PMI yang mendapat perlakuan tidak manusiawi.⁵

Di berbagai berita media massa acap kali diberitakan PMI mendapat perlakuan yang kurang baik oleh majikannya sampai-sampai berujung pada kematian. Banyak PMI diluar negeri ternyata banyak berbuntut pada permasalahan yang dialami oleh PMI. Memberi perlindungan untuk seluruh tumpah darah bangsa Indonesia pada dasarnya menjadi tanggungjawab Negara Indonesia sebagai institusi kekuasaan.

Tetapi tidak jarang negara gagal melindungi PMI yang bekerja di luar negeri. PMI seringkali diperlakukan sebagai target kejahatan, kekerasan, perbudakan, perdagangan manusia dan lain-lain yang melanggar HAM. Negara tidak sepenuhnya memberi perlindungan kepada warga negaranya ketika berada di luar negeri menjadikan hal tersebut sangat ironi.⁶

Seseorang yang bermigrasi dari wilayah kelahirannya ke tempat lain dalam waktu yang relatif menetap untuk kemudian bekerja disebut pekerja migran. Sedangkan PMI yaitu warga Negara Indonesia (selanjutnya disebut WNI) yang telah, akan, atau sedang melakukan bekerja di luar negeri dengan mendapat gaji dari luar wilayah Indonesia. Hal tersebut diatur didalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang PMI.⁷ Sedangkan calon PMI yaitu seorang tenaga kerja Indonesia yang melengkapi persyaratan pencari kerja yang terdaftar di instansi pemerintah kabupaten lalu akan bekerja diluar negeri berdasarkan pada Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 pasal 1 ayat (1) tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.⁸

Mudahnya seseorang melakukan perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain plus didukung fasilitas sarana dan prasarana yang tanpa batas yang menjadikan orang mudah untuk bermigrasi menandakan tanda dari kemajuan era globalisasi. Kemudahan ini termasuk terhadap pekerjaan, sekelumit birokrasi juga batasan jarak yang terpankaskan karena kebijakan tiap-tiap negara menjadikan mudah nya seseorang untuk datang ke wilayah negara lain atau pergi dari negara untuk bekerja.⁹

Tujuan utama orang bekerja di luar negeri yaitu untuk mendapatkan banyak penghasilan. Dengan iming-iming penghasilan yang besar, orang mulai berbondong-bondong bekerja di luar negeri, mengejar impiannya, serta menikmati kehidupan yang lebih baik, juga penyebab susah nya mencari kerja di Indonesia. Ribuan orang menempati berbagai pekerjaan, yang tidak memberikan kesempatan bagi angkatan kerja berikutnya. Pembatasan lowongan kerja di negara ini membuat masih banyak WNI atau TKI yang mencari kerja di luar negeri dengan jalu legal maupun ilegal bukan suatu masalah untuk mereka yang ingin mencari uang di dalam negeri. Banyaknya tenaga kerja Indonesia atau yang bekerja di luar negeri menjelaskan bahwasannya pemerintah Indonesia gagal memberikan solusi terhadap pengangguran dan kesejahteraan rakyat.

Dapat digolongkan menjadi beberapa macam migrasi Internasional, yaitu:

- a. Pencari suaka;
- b. Pekerja kontrak sementara;
- c. Migran ilegal;
- d. Migran permanen; dan
- e. Tenaga profesional dengan izin tinggal sementara.

⁵ Pocut Eliza, Op.cit., 1-2

⁶ Nova Andriani, Skripsi: Perlindungan Hukum Terhadap Hak-hak Pekerja Migran Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Aceh: Universitas Negeri Ar-Raniry Darusalam Banda Aceh, 2019), 6.

⁷ Pasal 1 Ayat (2) Undang-undang No.18 Tahun 2007 Tentang Pekerja Migran Indonesia.

⁸ Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang No.18 Tahun 2007 Tentang Pekerja Migran Indonesia.

⁹ Yuflih Huda dan Andrea Monica, "Proyeksi Pekerja Migran Dalam Sengketa Perburuhan Ditinjau Dari Undang-Undang No 6 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Internasional Convention on The Protection of The Rights of All Migrant Workers and Members Of Their Families Tahun 1990", Jurnal Hukum Lex Generalis 3 No. 5 (Mei 2022): 369

Dampak positif migrasi Internasional bagi pekerja migran ini menjadi kesempatan pengalaman bekerja di luar negeri, bagi keluarga migran ini bisa sebagai penghasilan untuk kebutuhan sehari-hari, bagi negara tujuan bisa sebagai pengisi bagian lapangan pekerjaan yang ditinggalkan masyarakat setempat, sedangkan bagi negara asal akan mendapatkan sumber pendapatan devisa negara.¹⁰

Setiap WNI dijamin memperoleh kehidupan dan pekerjaan yang layak tanpa diskriminasi serta mempunyai kesempatan dan hak yang sama berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap warga Indonesia juga khususnya PMI wajib dilindungi dari kejahatan, kekerasan, perbudakan, perdagangan manusia dan lain-lain yang melanggar HAM. Perlindungan PMI harus dalam satu kesatuan tatanan yang sistematis yang menyangkut Pemerintah dan masyarakat.¹¹

Terdapat 3 (tiga) macam perlindungan bagi PMI berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan PMI, yaitu:

1. Perlindungan pra penempatan;
2. Perlindungan selama bekerja; dan
3. Perlindungan purna penempatan.¹²

Pada tanggal 13 Juli 2022 Pengiriman PMI ke Malaysia diputuskan atau dihentikan sementara oleh pemerintah Republik Indonesia. Hal ini dikarenakan pelanggaran kesepakatan antar Indonesia dengan Malaysia atas MoU terkait Penempatan dan Perlindungan PMI di Malaysia. System Maid Online (SMO) menjadi sebab Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menghentikan penempatan PMI, ini menyangkut salah satunya tidak ada kejelasan untuk PMI yang bekerja terkait hak dan perlindungan yang mereka dapatkan.

¹⁰ Brian Dananjaya dan Lidya Marsaulina, "Analisis Perlindungan Hukum Warga Negara Indonesia di Luar Negeri," *Jurnal of Law and Border Protection* 2 No. 1 (2020): 26-28

¹¹ Anonim, "UU 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia," Diakses pada 19 Oktober 2022, 20:30, <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-18-2017-pelindungan-pekerja-migran-indonesia>

¹² Pasal 13, 21, dan 27 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Ditemukan ratusan PMI bagian domestik karena mekanisme SMO yang bermasalah. Maka dari itu seluruh proses penempatan ditutup sementara, sebelum ada perbaikan di sistem negara Malaysia. Pemerintah mengambil tindakan tegas terkait kasus ini, guna memberikan hak-hak dan perlindungan PMI sesuai yang diatur pada pasal 6,7, dan 8 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017.

Upaya perlindungan hukum yang diberikan pemerintah Indonesia teruntuk PMI di Malaysia bertujuan agar tidak terulangnya peristiwa-peristiwa pidana terhadap PMI sebagai korban, serta agar memastikan berjalannya program yang menguntungkan kedua pihak. Migrant care menyebutkan seratusan PMI meninggal didalam tahanan di Sabah Malaysia. Hak tersebut harus ditindaklanjuti demi tegaknya keadilan dan kemanusiaan oleh pihak Malaysia dan Indonesia. Guna memberikan manfaat dan solusi yang menguntungkan, serta memberi perlindungan hukum yang maksimal agar hak-hak Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (selanjutnya disebut PPMI) dapat dilindungi secara maksimal oleh kedua negara.¹³

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik meneliti terkait perlindungan Hak terhadap pekerja migran Indonesia yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2017 yang bertujuan untuk meneliti secara mendalam mengenai seberapa efektif pengaturannya terhadap hak-hak pekerja nigran yang bermigrasi keluar negeri. Penulis berharap tulisan ini dapat memberi saran-saran terkait apa yang seharusnya dilakukan agar masalah tersebut bisa diatasi, kemudian penulis dapat menarik rumusan masalah yaitu bagaimana-kah Perlindungan Hak Pekerja Migran Indonesia Sudah Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2017?.

¹³ Thaus Sugihilmi Arya Putra, Op.cit.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penulisan berdasarkan penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan, studi dokumen, atau penelitian hukum doktriner, yang mengkaji asas-asas/prinsip-prinsip hukum, mengkaji norma-norma, dan konsep-konsep hukum serta mengkaji sinkronisasi aturan hukum yang teruang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap hak-hak perlindungan hukum pekerja migran Indonesia saat bekerja di luar negeri. Sumbernya didapat melalui bahan hukum yang sebelumnya telah dikumpulkan dan diteliti, dan tentunya juga berkaitan dengan permasalahan di dalam penulisan ini, berupa buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, dan juga internet yang berkaitan.

C. Hasil dan Pembahasan

Perlindungan Hak Pekerja Migran Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2017

Bermigrasinya seseorang dari satu negara ke negara lain, untuk dipekerjakan oleh orang lain sebagai seorang migran menurut Internasional Labour Organisation (ILO) disebut pekerja migran. Tujuan Migrasi Internasional pekerja yaitu guna mencukupi kebutuhan jangka pendek di negara yang menjadi tujuan migrasi. Negara penerima perpindahan pekerja akan mendapatkan keuntungan berupa pasokan pekerja murah, sedangkan perpindahan pekerja dari negara pengirim ke negara penerima pekerja migran akan membuat negara pengirim mendapatkan keuntungan. Ketidaksamaan tingkat upah menjadi penyebab terjadinya migrasi pekerja secara global.

HAM yang merupakan bagian dari hak asasi manusia yang melekat pada diri setiap orang yaitu termasuk hak atas pekerjaan dan hak dalam bekerja, dan wajib dipenuhi, dilindungi, serta dihormati oleh negara, namun sayang perlakuan

semena-mena kepada PMI masih sering ditemui sampai sekarang.¹⁴

Perlindungan para PMI di lingkup nasional maupun internasional sudah diberikan oleh negara kepada kelompok PMI dalam bentuk peraturan perundang-undangan, namun sebuah permasalahan kepada PMI tidak pernah usai. Rentannya beragam tindakan tidak manusiawi, diskriminasi, eksploitasi dan lain-lain menjadikan PMI berada dalam posisi yang rentan akan permasalahan.

Perlindungan selama bekerja selain berlaku bagi pekerja migran itu sendiri, juga berlaku untuk keluarga yang ditinggalkan. Keluarga PMI mempunyai hak untuk melakukan pengaduan apabila di luar negeri keluarganya mengalami masalah, juga mempunyai hak atas fasilitas repatriasi berupa pemulangan karena bencana alam, deportasi, sakit, dan lain-lain. Suatu kebutuhan pokok merupakan hak pekerja migran Indonesia, karenanya harus adanya perlindungan yang memadai karena menyangkut dengan hak pekerja atas pekerjaan yang mereka kerjakan, dan hak-hak lainnya.¹⁵

Menurut Surtess, pemalsuan dokumen, pemberian informasi yang salah, kekerasan, dan penyalahgunaan (penyimpangan) merupakan hal yang sering berkaitan dengan masalah pekerja migran Indonesia. Kemudian permasalahan yang kerap mencuat mengenai PMI yaitu:

1. Pelanggaran HAM terhadap PMI masih kurang diperhatikan pemerintah Indonesia;
2. Titik awal banyaknya pelanggaran HAM terhadap PMI disebabkan karena peraturan untuk menempatkan PMJ sebagai komoditi yang diperdagangkan;
3. Minimnya perlindungan;
4. Ancaman hukuman penjara sampai mati;
5. Belum mengacunya kepada kesepakatan internasional terkait sistem penempatan dan perlindungan negara pengirim pekerja migran;

¹⁴ Fadilah Lay Fatimah Ely, Popi Tuhulele, Dyah Ridhul Airin Daties, "Pengaturan Tentang Pekerja Migran dan Tanggung Jawab Negara," *Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum* 2 No. 2 (April 2022): 123

¹⁵ Eka Putri Yuliani, *Op.cit.*, 76-77

6. Kesulitan Indonesia mempengaruhi negara lain untuk melindungi pekerja migran;
7. Pekerja migran dipekerjakan murah karena banyaknya jumlah pekerja migran, yang membuat negara-negara penerima mempunyai opsi yang banyak;
8. Kekuasaan yang absolut dimiliki oleh majikan diluar negeri;
9. Jumlah buruh migran yang tewas relatif tinggi; dan
10. Adanya penyiksaan dan kekerasan terhadap pekerja migran.¹⁶

Hak mendapat penghidupan yang pantas untuk kemanusiaan dan hak mendapat pekerjaan pada dasarnya merupakan hak setiap warga negara.¹⁷ Maksudnya dilakukan atas nama kemanusiaan untuk memberi hak bagi warga negara tak cuma karena hukum semata atau tanggungjawab tertulis. Hak-hak yang tidak dapat diingkari yang erat secara kodrati pada manusia bagaikan anugerah Tuhan Yang Maha Esa berupa HAM. Suatu yang bisa mengingkari martabat kemanusiaan salah satunya pengingkaran terhadap HAM.¹⁸

Khususnya PMI yang bekerja diluar negeri, apalagi dalam rumor perlindungan warga negara, sangat penting nya perlindungan negara bagi kelangsungan hidup dan pemenuhan hak-hak pekerja migran yang merupakan kaum sensitif akan jenis-jenis pelanggaran HAM. Hal tersebut yang mendasari alasan pekerja migran bukan bagian dari warga negara daerah mereka bekerja juga tinggal, akibat nya mereka tidak mendapatkan perlindungan penuh dari pemerintah negara yang bersangkutan. Didalam Undang-Undang dan peraturan-peraturan lain, pemerintah masih harus menggalakkan untuk mengimplementasikan PPMI, walaupun menurut hukum internasional sebagaimana konvensi Internasional terkait

perlindungan pekerja migran, secara hukum pekerja migran sudah diberikan perlindungan.¹⁹

Pembangunan di bidang ekonomi nasional ialah suatu upaya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) guna terus mengembangkan sistem pembangunan, yang bertujuan untuk terwujudnya masyarakat yang adil, bahagia, merata dan sentosa, secara kerohanian maupun secara material. Konstitusi Indonesia menjamin hak demi mendapa kerja, ini diatur pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat (2). Walaupun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa ketersediaan lapangan pekerjaan bagi seluruh pencari kerja masih kurang di dalam negeri, karenanya daripada mereka banyak yang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan di luar negeri.²⁰ Rendahnya gaji di dalam negeri, keadaan berita di desa-desa terkait cara bekerja di luar negeri, sempitnya lahan pekerjaan, mudah dan murah nya proses pengiriman, keterampilan dan tingkat pendidikan yang masih rendah, menjadi penyebab bermigrasinya WNI ke luar negeri.²¹

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang PPMI telah mengatur terkait perlindungan dan penugasan tenaga kerja di luar negeri, ini adalah cara pemerintah demi pekerja migran Indonesia agar hak-hak nya terlindungi. Tujuan dari Undang-Undang ini selain untuk penegakkan HAM selaku PMI dan warga negara, juga agar pemenuhan hak-hak PMI terjamin, serta menjamin keluarganya, perlindungan ekonomi, hukum dan sosial pekerja migran Indonesia.²²

Tapi pada kenyataannya seringkali belum sepenuhnya efektif menjamin hak-hak PMI seperti yang ada di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran. Selama bekerja diluar negeri masih sering ditemui

¹⁶ Josep Robert Khuana, "Pengaturan dan Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Migran Lintas Negara Dalam Perspektif Hukum Internasional," *Jurnal Kertha Semaya* 8 No. 8 (2020): 1279-1280

¹⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 27 ayat 2.

¹⁸ Lalu Husni, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri," *Mimbar Hukum* 23 No 11 (Februari 2011): 125.

¹⁹ Ibid

²⁰ Khairur Rizki, "Implementasi Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Hak Pekerja Asing dan Anggota Keluarganya: Studi kasus Penjaminan Hak Pekerja Migran Indonesia di Singapura," *Resiprokal* 2 No. 1 (Juni 2020): 23

²¹ Adharinalti, "Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Irregular di Luar Negeri," *Jurnal Rechts Vinding BPHN* 1 Vol. 1 (April 2012): 165

²² Eka Putri Yuliani, *Op.cit.*, 4

hak-hak mereka yang tidak terpenuhi.

Berita-berita terkait kasus dan penderitaan PMI masih sering ditemui. Seperti PMI pelaut yang diperbudak, penyiksaan, pembunuhan terhadap PMI, ditahan karena menjadi pekerja ilegal, dan proses deportasi yang kurang manusiawi. Pada saat pandemik COVID-19 menjadi ancaman dan kondisi semakin sulit bagi PMI berhubungan dengan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi secara besar-besaran setelah sejumlah negara tujuan PMI mengalami resesi. Laporan praktik penyiksaan kepada PMI juga meningkat akibat dampak pandemik Covid-19 yang menyebabkan tekanan kepada pemberi kerja. Kondisi seperti ini menjelaskan belum maksimalnya perlindungan terhadap PMI seperti amanat dari Undang-Undang PPMI. 5 (lima) tahun pasca pengundangan Undang-Undang PPMI seharusnya telah ada peningkatan perlindungan terhadap PMI.²³

Perlindungan hukum terhadap hak-hak PMI sendiri tercantum didalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 pada pasal 6 ayat (1) sebagai berikut: "Pekerja dan Calon pekerja migran Indonesia memiliki hak:

1. Mendapat informasi yang tepat mengenai kondisi kerja diluar negeri, pasar kerja dan tata cara penempatan;
2. Mendapatkan perjanjian dan dokumen kerja calon PMI ataupun PMI
3. Berkumpul dan berserikat atas syarat aturan perundang-undangan yang berlaku di negara tujuan penempatan;
4. Mendapatkan akses komunikasi;
5. Mendapatkan bantuan dan perlindungan hukum sesuai syarat aturan perundang-undangan di Indonesia dan di negara tujuan penempatan;
6. Melaksanakan sembahyang sesuai kepercayaan atau agama yang diyakininya;

²³ Luthfi Febryka Nola, "Dampak Pelanggaran Batas Waktu Pembentukan Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia," Jurnal Negara Hukum 11 No. 2 (November 2020): 250

7. Mendapat pelatihan kerja dan akses pengembangan *skill* lewat pendidikan;
8. Mendapatkan pekerjaan diluar negeri dan memilih sesuai keahliannya;
9. Mendapatkan keamanan kepulauan dan perlindungan keselamatan PMI ke tempat awal;
10. Menguasai dokumen perjanjian selama bekerja;
11. Mendapatkan kewajiban dan penjelasan hak sebagaimana tertuang dalam perjanjian kerja;
12. Mendapatkan upah sesuai kesepakatan kedua negara atau sesuai standar bayaran yang diberlakukan oleh negara tujuan penempatan perjanjian kerja; dan
13. Tidak boleh diskriminasi ketika bekerja, setelah bekerja, dan sebelum bekerja, serta mendapat layanan profesional."²⁴

Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 diatur terkait asas PPMI yang menyebutkan: "Perlindungan pekerja migran Indonesia mempunyai asas: Keterpaduan;

1. Anti-perdagangan manusia;
2. Keadilan dan kesetaraan gender;
3. Demokrasi;
4. Persamaan hak;
5. Akuntabilitas;
6. Diakui berdasarkan martabat HAM;
7. Keterpaduan;
8. Keadilan sosial;
9. Nondiskriminasi;
10. Transparansi; dan
11. Berkelanjutan."²⁵

Lalu dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 diatur tujuan PPMI yang berbunyi: "Pekerja migran Indonesia bertujuan:

1. Sebagai warga negara dan pekerja migran Indonesia dijamin pemenuhan serta penegakan HAM; dan
2. Dijamin perlindungan keluarganya, perlindungan ekonomi, hukum dan sosial pekerja migran Indonesia."²⁶

²⁴ Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017

²⁵ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017

²⁶ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017

Negara diminta aktif demi memberi perlindungan bagi warga negaranya guna memberi perlindungan HAM dalam bekerja. Disamping memiliki kewajiban tenaga kerja selama bekerja juga memiliki kesempatan dan hak yang sama tanpa diskriminasi baik didalam negeri ataupun diluar negeri.²⁷

Terlebih masih maraknya kasus permasalahan mulai dari pelecehan seksual, dipenjara, diusir, dianiaya, dibunuh, diperkosa, upah yang tidak sesuai dengan perjanjian, gaji yang ditunggak serta perlakuan lainnya yang tidak manusiawi oleh majikan PMI seperti tidak ada habisnya dan selalu marak ditemukan.²⁸

Dilansir dari media massa Liputan 6.com ada kasus yang sempat ramai atau viral yang menimpa PMI pada tahun 2018 tepatnya tanggal 05 maret, berikut ulasannya: Petronela Malena (34) asal Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, setelah menelepon Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) berhasil lolos dari rumah majikannya, karena Petronela hampir saja kehilangan nyawa. Petronela akhirnya dipulangkan setelah koordinasi antara KJRI dengan pihak rohaniwan pada 02 Maret 2018. Pada bulan Mei 2009 Petronela tanpa izin orang tuanya mengakui direkrut PT Putra Jabung Perkasa yang berada di Kupang. Petronela bekerja sebagai asisten rumah tangga (ART) dengan seseorang yang bernama Tante Poh sebagai seorang pengusaha. Petronela dilarang untuk menghubungi orang tuanya dan siapaun selama bekerja sembilan tahun oleh majikannya. Dari kasus Petronela dapat dilihat masih belum sepenuhnya perlindungan yang efektif diberikan kepada pekerja migran Indonesia.²⁹

Terjadi eksploitasi pada kenyataannya terhadap pekerja migran Indonesia menjadikan situasi ini tentu sangat ironi dalam rangka perkembangan

di bidang ekonomi tercapai. Padahal telah diatur jelas terkait perlindungan hak-hak PMI ketika penempatan, setelah penempatan, dan pra penempatan di dalam peraturan Undang-Undang. Juga masih banyak anggapan bahwa pekerjaan migran merupakan orang-orang yang dapat dikorbankan, rela diperlakukan dengan keadaan kerja 3D yaitu melecehkan (*degrading*), kotor (*dirty*), berbahaya (*dangerous*), ditindas, sumber tenaga kerja murah, dan hina. Bahkan warga negara nya tidak mau atau tidak bersedia menerima pekerja migran di tempat warga negaranya berimigrasi. Situasi ini yang mengakibatkan hak-hak pekerja migran diabaikan dan dilecehkan.³⁰

Faktor yang menjadi belum sepenuhnya efektif terkait perlindungan hukum PMI yang bekerja di luar negeri yaitu:

1. Tidak berfungsi secara optimal keberadaan perwakilan Republik Indonesia;
2. Lapangan kerja tidak mampu diciptakan oleh pemerintah Indonesia;
3. Hukum yang lemah yang menjamun PMI di negara tujuan;
4. Lemahnya diplomasi Indonesia;
5. Antar Indonesia dengan negara tujuan PMI di luar negeri masih kurang dalam hal perjanjian bilateral; dan
6. PMI di negara tujuan sulit didata keberadaannya.³¹

Problematika terkait Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia terkadang belum sepenuhnya efektif mengenai upaya pemerintah guna memberi perlindungan hukum untuk PMI pada upaya melindungi hak-hak mereka, contohnya sebagai berikut:

²⁷ A. A. Titah Ratihtari, I Wayan Parsa, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri," Kertha Semaya 7 No. 7 (Juni 2019): 4

²⁸ Ibid

²⁹ Ola Keda, "Kisah TKI Asal Ntt Lolos dari Majikan Galak di Malaysia," Diakses pada 22 Oktober 2022, 21:03, <https://www.liputan6.com/regional/read/3343922/kisah-tki-asal-ntt-lolos-dari-majikan-galak-di-malaysia>

³⁰ Atik Krustiyati, "Optimalisasi Perlindungan dan Bantuan Hukum Pekerja Migran Melalui Promosi Konvensi Pekerja Migran Tahun 2000," Jurnal Dinamika Hukum 13 No. 1 (Januari 2013): 141.

³¹ Endar Susila, "Rekonstruksi Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Dalam Perspektif UU No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang Berbasis Nilai Keadilan," Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE 9 No. 2 (November 2006): 161

Pertama, hak mendapatkan perlindungan hukum yang telah diatur sesuai peraturan Undang-Undang atas perlakuan yang merendahkan martabat dan harkatnya, PMI seringkali mendapat perlakuan yang biadab berupa dianiaya oleh majikannya. Hak guna mendapat perlakuan yang manusia bagi mereka telah dirampas dengan bukti nyata tersebut. Mereka padahal telah melayani dan memenuhi kewajiban sebagai PMI, seharusnya para PMI mendapatkan hak perlindungan yang jelas serta rasa aman terhadap kekerasan fisik dari negara.

Kedua, lambatnya pemberian bantuan hukum oleh pemerintah lewat perwakilan negara Indonesia dalam beberapa kasus di luar negeri. Seharusnya mereka dengan cepat diberikan hak bantuan hukum sesuai yang diatur dalam Undang-Undang di negara tujuan serta hukum dan kebiasaan Internasional. Pemberian bantuan hukum harus sesegera mungkin diberikan kepada mereka agar kasus cepat diselesaikan. Ini wajib dibenahi oleh pemerintah terkait PPMI.

Banyaknya pelanggaran hak yang dialami oleh PMI menjelaskan masih lemahnya penegakan hukum kemudian tidak mencerminkan cita hukum bangsa Indonesia terkait pelanggaran-pelanggaran tersebut sebagai nilai positif pancasila yang tertinggi khususnya silakan kedua yang harus menempatkan manusia sebagai makhluk hidup yang mempunyai martabat dan harkat.³²

Semua aspek perlindungan kepada pekerja migran Indonesia diperlukan guna memberi keselamatan, kesehatan kerja perlindungan hak-hak dasar, jaminan sosial serta perlindungan upah sehingga terwujudnya kehidupan yang seimbang, selaras, serasi, sejahtera, adil, dan rasa aman serta tentram. Kesempatan yang sama (*equal opportunity*) serta jaminan hak-hak dasar (*basic rights*) adalah maksud dari perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia agar terwujudnya kesejahteraan dan keluarga para pekerja migran dalam rangka keadilan hubungan industrial tanpa perlakuan diskriminasi.

Sebaiknya Negara Indonesia wajib melakukan peningkatan perlindungan dan peningkatan kerjasama antara negara yang satu dengan negara yang lain yang dijadikan sebagai negara penempatan PMI, supaya pemenuhan hak-hak, keselamatan, dan keamanan lebih jauh terjamin. Dalam pelaksanaan PPMI membutuhkan penegakkan hukum yang tegas dan pengawasan hukum. Mencakup pengawasan dalam hal perlindungan hukum setelah bekerja, sebelum bekerja, dan selama bekerja. Meliputi sanksi pidana dan administratif dalam penegakan hukum.

D. Simpulan

Pekerja migran Indonesia belum sepenuhnya mendapatkan kepastian perlindungan hukum terkait hak-hak mereka ketika bermigrasi atau bekerja di luar negeri. Aturan terkait perlindungan hukum atas hak-hak pekerja migran memang sudah ada dan diatur di dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia, tetapi pada kenyataannya masih seringkali mengalami disharmonisasi sehingga tidak terlaksananya peraturan secara efektif dan tidak dapat berfungsi sebagai kepastian hukum. Problematika antara peraturan dengan kenyataannya menjadikan para pekerja migran Indonesia rentan akan permasalahan khususnya mengenai di harganya ataupun dijaminnya hak-hak mereka ketika bekerja. Permasalahan kasus pelecehan, perdagangan manusia, kerja paksa, serta hal lainnya masih menjadi persoalan yang sering ditemui sampai sekarang, ini menandakan hak-hak pekerja migran masih belum sepenuhnya terlindungi oleh Hukum yang sudah diatur. Ketidaksesuaian dan ketidakharmisan antara peraturan yang ada dengan kenyataannya, seharusnya menggerakkan pemerintah Indonesia sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk terus melakukan peninjauan agar merevisi atau mempeharui peraturan yang ada sehingga aturan yang sudah ada itu terus mengalami penyempurnaan sesuai dengan Hukum yang dinamis dan agar sesuai dengan perkembangan kasus yang ada di masa sekarang, guna menjamin

³² Nova Andriani, Op.cit., 55-56

terlindunginya hak-hak pekerja migran Indonesia agar terhindar, meminimalisir sekecil mungkin permasalahan-permasalahan terkait kasus-kasus yang sudah disebutkan diatas dan supaya tidak terulang kembali kasus yang menimpa pekerja migran Indonesia yang sedang bekerja di luar negeri. Terakhir pekerja migran Indonesia harusnya lebih paham terkait hak-hak nya dan sebaiknya meningkatkan kesadaran Hukum mengenai hak-hak mereka ketika bekerja di luar negeri agar terhindar dari permasalahan yang ada serta menghindari kasus yang kiranya akan menimpa mereka di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- A. A. Titah Ratihtari, I Wayan Parsa, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri," *Kertha Semaya* 7 No. 7 (Juni 2019): 4
- Adharinalti, "Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Irregular di Luar Negeri," *Jurnal Rechts Vinding BPHN* 1 Vol. 1 (April 2012): 165
- Anonim, "UU 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia," Diakses pada 19 Oktober 2022, 20:30, <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-18-2017-pelindungan-pekerja-migran-indonesia>
- Atik Krustiyati, "Optimalisasi Perlindungan dan Bantuan Hukum Pekerja Migran Melalui Promosi Konvensi Pekerja Migran Tahun 2000," *Jurnal Dinamika Hukum* 13 No. 1 (Januari 2013): 141.
- Brian Dananjaya dan Lidya Marsaulina, "Analisis Perlindungan Hukum Warga Negara Indonesia di Luar Negeri," *Jurnal of Law and Border Protection* 2 No. 1 (2020): 26-28
- Eka Putri Yuliana, Skripsi: Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Terhadap Perlindungan Hak Pekerja Migran Indonesia studi di P4TKI Malang, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019), 2.
- Endar Susila, "Rekonstruksi Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Dalam Perspektif UU No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang Berbasis Nilai Keadilan," *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE* 9 No. 2 (November 2006): 161
- Fadilah Lay Fatimah Ely, Popi Tuhulele, Dyah Ridhul Airin Daties, "Pengaturan Tentang Pekerja Migran dan Tanggung Jawab Negara," *Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum* 2 No. 2 (April 2022): 123
- Josep Robert Khuana, "Pengaturan dan Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Migran Lintas Negara Dalam Perspektif Hukum Internasional," *Jurnal Kertha Semaya* 8 No. 8 (2020): 1279-1280
- Khairur Rizki, "Implementasi Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Hak Pekerja Asing dan Anggota Keluarganya: Studi kasus Penjaminan Hak Pekerja Migran Indonesia di Singapura," *Resiprokal* 2 No. 1 (Juni 2020): 23
- Lalu Husni, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri," *Mimbar Hukum* 23 No 11 (Februari 2011): 125.
- Luthfi Febryka Nola, "Dampak Pelanggaran Batas Waktu Pembentukan Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia," *Jurnal Negara Hukum* 11 No. 2 (November 2020): 250

Nova Andriani, Skripsi: *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-hak Pekerja Migran Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia* (Aceh: Universitas Negeri Ar-Raniry Darusalam Banda Aceh, 2019), 6.

Ola Keda, "Kisah TKI Asal Ntt Lolos dari Majikan Galak di Malaysia," Diakses pada 22 Oktober 2022, 21:03, <https://www.liputan6.com/regional/read/3343922/kisah-tki-asal-ntt-lolos-dari-majikan-galak-di-malaysia>

Undang-Undang

Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang No.18 Tahun 2007 Tentang Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 1 Ayat (2) Undang-undang No.18 Tahun 2007 Tentang Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017

Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017

Pasal 13, 21, dan 27 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 27 ayat 2.

Lain-Lain

Pocut Eliza, Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum Mengenai Perlindungan Hak dan Keselamatan Pekerja Migran (Jakarta: Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum, 2016), 1-2.

Thaus Sugihilmi Arya Putra, "Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri," Diakses pada 23 Oktober 2022, 14:16, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/15248/Perlindungan-Hukum-Pekerja-Migran-Indonesia-di-Luar-Negeri.html>

Yuflih Huda dan Andrea Monica, "Proyeksi Pekerja Migran Dalam Sengketa Perburuhan Ditinjau Dari Undang-Undang No 6 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Internasional Convention on The Protection of The Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families Tahun 1990", *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3 No. 5 (Mei 2022): 369.